

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab ini. Pada bagian ini sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua bagian utama yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Ambon untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, perkiraan capaian Tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon yang meliputi Kondisi Ekonomi Kota Ambon Tahun 2017 dan Proyeksi 2018 serta Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Ambon Tahun 2018, dan Tahun 2019. Selanjutnya pada bagian akhir, disajikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon

Arah kebijakan ekonomi di Kota Ambon Tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku. Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 - 5,8 persen. Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3 – 6,8 persen. Sasaran pertumbuhan ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi pada wilayah yang mengalami ketertinggalan akses dan mutu terhadap pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan infrastruktur komunikasi dan transportasi.

Sejalan dengan Arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku, arah kebijakan ekonomi Kota Ambon ditujukan untuk:

1. Mengontrol stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi serta menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah;

2. Meningkatkan daya saing masyarakat melalui program-program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
3. Optimalisasi pelayanan perizinan berbasis elektronik dan efisien sehingga mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin;
4. Memperkuat Badan Usaha Milik Daerah dan Desa sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat;

Seyogyanya, arah kebijakan ekonomi Kota Ambon Tahun 2019 ditujukan untuk mewujudkan Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 yaitu : **“Memberdayakan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Menuju Kemandirian yang Kreatif Berbasis Sumber Daya Alam yang Tersedia”**.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Ambon Tahun 2017, dan Perkiraan Tahun 2018

Dalam menganalisis kondisi ekonomi daerah Kota Ambon tahun 2017, data BPS yang tersedia, adalah data ekonomi makro daerah Kota Ambon tahun 2016. Karena itu ketika memberikan gambaran ekonomi daerah Kota Ambon tahun 2017, dan perkiraan tahun 2018, mengacu kepada data dasar makro ekonomi daerah tahun 2016, dengan memperhatikan capaian-capaian kondisi ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018.

a. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Ambon tahun 2016 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 adalah sebagaimana Tabel III.1, dengan kategori basis adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan kontribusi sebesar Rp.1,939 triliun lebih (22,29%); dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 1,920 triliun lebih (22,08%) bagi PDRB Kota Ambon.

Selain kedua kategori basis di atas, beberapa kategori lapangan usaha lain juga turut memberikan kontribusi bagi perekonomian Kota Ambon. Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 902,13 milyar lebih (10,37%); kategori Informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 814,3 milyar lebih (9,36%); kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi sebesar 593,6,6 milyar lebih (6,82%); kategori kategori Jasa Pendidikan memberikan kontribusi sebesar 466,1 milyar lebih (5,36%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 464,4 milyar lebih (5,34%); dan kategori Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 404,9 milyar lebih (4,65%).

Tabel III.1. Pertumbuhan dan Kontribusi Setiap Kategori Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kondisi Tahun 2015 dan 2016								
Kategori	Uraian Lapangan Usaha	Jumlah Tahunan (Rp. Juta)		Laju Pertumbuhan		Kontribusi		Peringkat Kontribusi PDRB 2016
		2015 **)	2016 **)	2015	2016	2015	2016	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,818,045.64	1,939,022.39	7.88%	6.65%	22.14%	22.29%	1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,796,744.54	1,920,924.52	8.16%	6.91%	21.88%	22.08%	2
H	Transportasi dan Pergudangan	883,062.30	902,135.74	5.29%	2.16%	10.76%	10.37%	3
J	Informasi dan Komunikasi	741,158.66	814,373.28	8.72%	9.88%	9.03%	9.36%	4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	545,620.51	593,626.87	6.28%	8.80%	6.65%	6.82%	5
P	Jasa Pendidikan	428,412.98	466,139.12	7.65%	8.81%	5.22%	5.36%	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	457,852.76	464,491.09	-2.93%	1.45%	5.58%	5.34%	7
F	Konstruksi	381,441.21	404,980.71	5.27%	6.17%	4.65%	4.65%	8
C	Industri Pengolahan	325,477.18	341,942.24	6.46%	5.06%	3.96%	3.93%	9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	269,699.83	265,839.38	8.94%	-1.43%	3.29%	3.06%	10
R, S, T, U	Jasa lainnya	164,547.30	175,886.42	6.35%	6.89%	2.00%	2.02%	11
M, N	Jasa Perusahaan	165,217.43	171,164.73	5.11%	3.60%	2.01%	1.97%	12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90,114.56	92,626.77	2.14%	2.79%	1.10%	1.06%	13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76,635.70	78,197.38	0.91%	2.04%	0.93%	0.90%	14
L	Real Estate	27,011.23	27,755.31	2.28%	2.75%	0.33%	0.32%	15
B	Pertambangan dan Penggalian	21,916.77	23,418.53	6.69%	6.85%	0.27%	0.27%	16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,045.78	18,479.34	8.30%	8.41%	0.21%	0.21%	17
PDRB ADHK 2010		8,210,004.37	8,710,003.82	6.57%	5.98%			

**) Data Sementara

Sumber: BPS Kota Ambon, 2016

Pada sisi lain terdapat beberapa kategori lain yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota Ambon, meskipun tidak basis, yaitu Industri Pengolahan (3,93%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,06%); Jasa Lainnya (2,02%); Jasa Perusahaan (1,97%); Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (1,06%); Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,90%); Real Estate (0,32%); Pertambangan dan Penggalian (0,27%), serta Pengadaan Listrik dan Gas (0,16%).

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah penyumbang utama perekonomian di Kota Ambon disebabkan oleh peran kota Ambon sebagai pusat kegiatan nasional, sekaligus pusat pemerintahan di Provinsi Maluku, sehingga belanja pemerintahan dan belanja aparatur dari gaji Pegawai Negeri Sipil, dan TNI-POLRI tingkat Provinsi Maluku dan Kota Ambon dilakukan di kota ini.

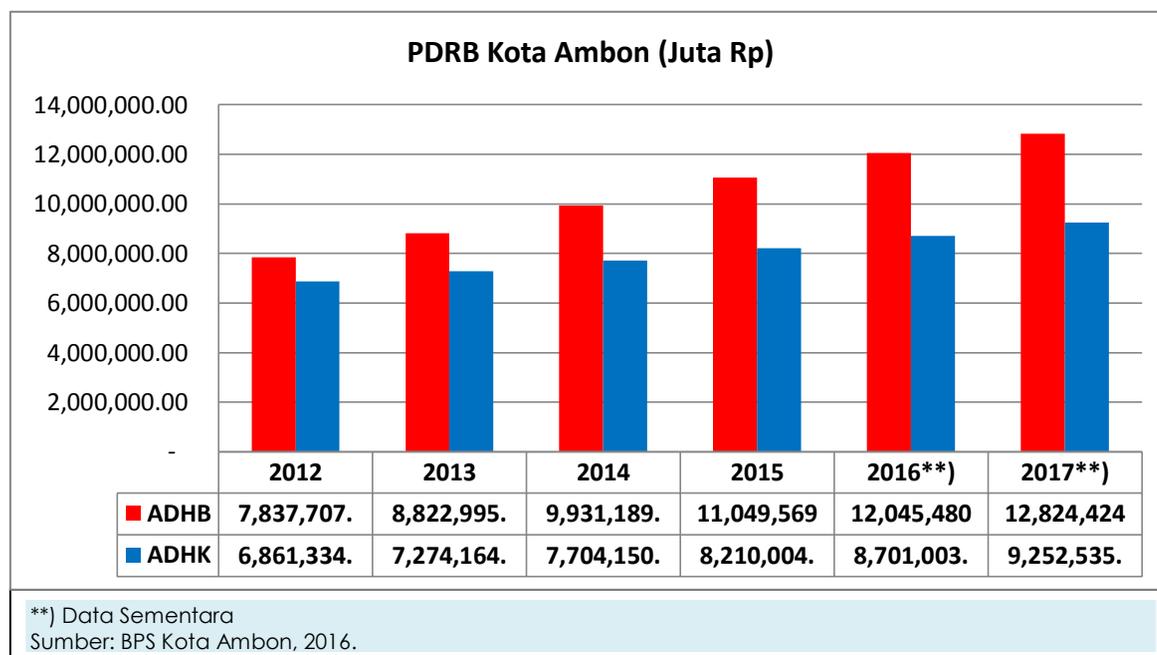
Penyumbang utama kategori Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, adalah sub kategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Kondisi ini disebabkan oleh peran Kota Ambon sebagai pintu gerbang masuknya barang dan jasa dari dan ke wilayah lain di Provinsi Maluku, Regional, dan Nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat dampak ikutan dari belanja kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan di kota ini.

Secara keseluruhan perekonomian di Kota Ambon didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi (Tabel III.1), maka terdapat 5 aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan yang utama yaitu (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Transportasi dan Pergudangan, (4) Informasi dan Keuangan, serta (5) Jasa Keuangan dan Asuransi, yang secara keseluruhan menyumbang sebanyak 70,83% dari PDRB Kota Ambon Tahun 2016. Beberapa aktivitas yang menunjang Kota Ambon sebagai kota jasa, juga tergambar dari kontribusi jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya, yang mencapai 10,39% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi aktivitas jasa ke depan.

Jika mengamati struktur ekonomi Kota Ambon tahun 2016 yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2017 dan 2018, diperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2016, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

b. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

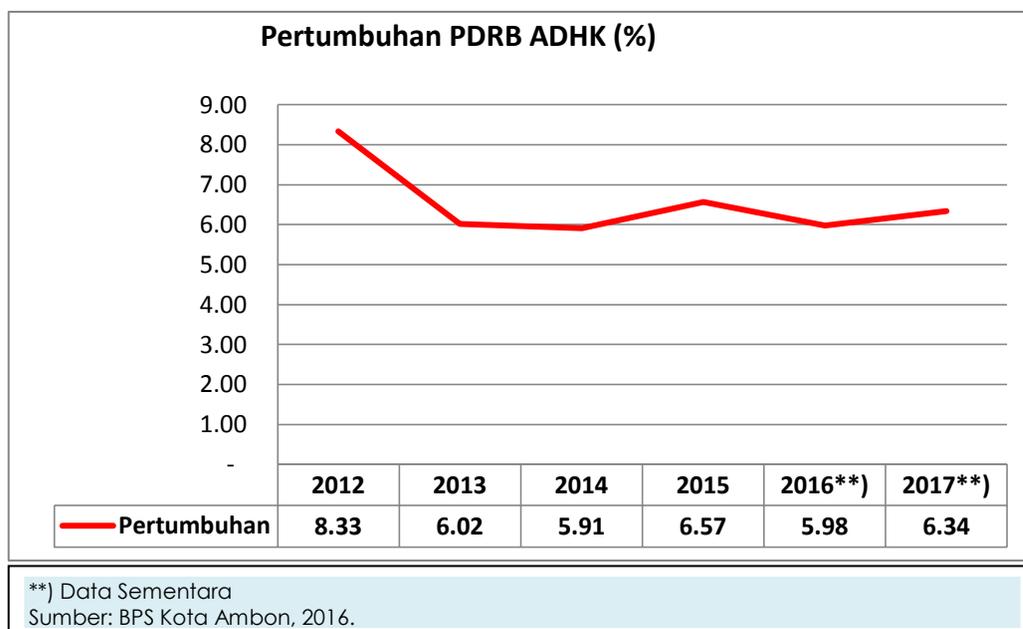
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010), terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan yang berkembang maju (Gambar III.1).



Gambar III.1. PDRB Kota Ambon ADHK 2010 Tahun 2012-2017

Pada tahun 2017, PDRB Kota Ambon atas dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.12,824 trilyun lebih, atau meningkat sebesar Rp.778 milyar lebih (6,47%) dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp.12,045 trilyun lebih. Sementara itu, PDRB Kota Ambon tahun 2017 atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) mencapai Rp.9,252 trilyun lebih. PDRB atas dasar Harga Konstan (ADHK) ini meningkat sebesar Rp.551 milyar lebih (6,34%) dibanding tahun 2016 yang adalah Rp.8,701 trilyun lebih.

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, meskipun cenderung melambat dari tahun 2012 (Gambar II.10). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,34% mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 5,98%.



Gambar III.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2012-2017 (ADHK Tahun 2010)

Kondisi ekonomi Kota Ambon tahun 2017, tidak terlepas pula dari trend kondisi ekonomi makro di Provinsi Maluku. Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia (Edisi Februari 2017), pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2017 mencapai 5,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,73% (yoy). Pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku ini, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07% (yoy). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Maluku tahun 2017 mencapai Rp.27,81 Triliun, dimana Rp.12,82 Triliun (46,10%), disumbangkan dari Kota Ambon.

Mencermati kondisi ekonomi Kota Ambon pada tahun 2016 dan 2017, serta kondisi ekonomi makro dan regional Provinsi Maluku tahun 2017, maka pada tahun 2018, perekonomian Kota Ambon diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, pada kisaran 5,5 sampai 6,5%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2018 didukung oleh tingginya konsumsi rumah tangga dan investasi Pemerintah dengan penelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak tahun 2018, penyerapan Dana Desa, kegiatan-kegiatan nasional di daerah seperti Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), serta masih berlanjutnya pembangunan proyek-proyek pemerintah maupun swasta, maupun kegiatan fisik pembangunan daerah Kota Ambon dengan sumber dana dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2018 juga dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga oleh adanya perayaan hari-hari besar keagamaan maupun nasional, serta pemanfaatan hari-hari liburan sekolah.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin lemahnya/merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Inflasi memberikan indikasi adanya kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu, meskipun kenaikan harga-harga tersebut tidak secara bersamaan.

Secara keseluruhan, Kota Ambon selama tahun 2017 mengalami deflasi, atau inflasi sebesar -0,05% (Tabel III.2). Inflasi negatif atau deflasi Kota Ambon tahun 2017 ini adalah pertama kali terjadi sejak tahun 2011. Kondisi ini menggambarkan bahwa selama tahun 2017, harga-harga cenderung terkendali, malah lebih rendah dari tahun 2017. Inflasi tertinggi selama tahun 2107 terjadi di bulan Juni sebesar 2,91%. Sedangkan inflasi negatif atau deflasi terjadi di bulan Pebruari, April, Agustus, September, Oktober, dan Nopember.

Tabel III.2. Inflasi Kota Ambon Tahun 2011-2017 Dirinci Per Bulan

No.	Bulan	Laju Inflasi Indeks Umum (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	-0,83	1,62	1,81	0,81	2,37	0,28	0,28
2	Pebruari	0,04	1,31	-2,29	0,85	1,03	0,18	-0,74
3	Maret	-0,46	1,33	0,79	0,64	0,44	-0,36	1,13
4	April	0,09	0,79	0,27	0,92	0,33	-1,07	-0,76
5	Mei	1,66	0,06	2,25	0,40	1,06	1,64	0,2
6	Juni	3,76	2,39	-0,15	0,18	-0,25	0,23	2,91
7	Juli	-1,20	1,70	4,30	0,14	1,03	0,5	0,86
8	Agustus	0,83	0,19	4,79	0,12	-1,77	0,43	-2,08
9	September	-0,40	-1,87	-0,92	-0,26	0,38	-0,11	-0,23
10	Oktober	-0,67	-2,44	-3,82	0,15	1,02	0,53	-1,28
11	Nopember	-0,34	0,63	0,53	0,82	-0,44	0,48	-0,59
12	Desember	0,43	0,94	1,51	1,85	0,62	0,53	0,34
Laju Inflasi Kumulatif		2,85	6,37	8,81	6,81	5,92	3,28	-0,05

Sumber: BPS Kota Ambon, 2018.

Perkembangan laju inflasi Kota Ambon Tahun 2018, diharapkan dapat juga dikendalikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Ambon, pada bulan April 2018, Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,57. Sebelumnya pada bulan Maret 2018, Kota Ambon juga mengalami deflasi sebesar 0,14 pesen. Inflasi tahun kalender Kota Ambon di bulan April 2018 sebesar -0,53 persen atau terjadi penurunan IHK dari 127,25 pada Maret 2018 menjadi 126,57 pada April 2018. Inflasi tahun kalender Kota Ambon pada April 2018 adalah sebesar 0,62 persen, dan inflasi tahun ke tahun (April 2018 terhadap April 2017) sebesar 0,68 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, pada bulan April 2018, terjadi deflasi pada 2 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,64 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,15 persen. Pada bulan yang sama terjadi inflasi pada 5 kelompok pengeluaran yang lain yaitu makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,20 persen; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen; sandang sebesar 0,46 persen; kesehatan sebesar 0,09 persen; dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.

Pengendalian inflasi Kota Ambon diharapkan dapat berjalan secara dinamis sepanjang tahun 2018 ini, meskipun disadari dapat juga dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti kenaikan BBM Non Subsidi. Faktor alam, seperti musim timur dengan curah hujan tahunan tertinggi, yang biasanya terjadi pada Mei sampai Agustus, diperkirakan dapat mempengaruhi pasokan dan harga beberapa bahan pangan, khususnya ikan dan sayur mayur. Faktor non alam, seperti perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti bulan Puasa Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, memang dapat mempengaruhi kenaikan harga, sehingga upaya-upaya menekan harga dengan berkoordinasi dengan para pihak oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon dan Provinsi Maluku, kiranya dapat memberikan dampak yang positif bagi gerak perekonomian Kota Ambon Tahun 2018.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Ambon Tahun 2018, dan Tahun 2019

Prospek perekonomian Kota Ambon pada tahun 2018 dan tahun 2019 diharapkan masih dalam pertumbuhan yang positif, dan memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan pembangunan nasional. Mengacu kepada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yaitu "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", maka sasaran dan kondisi ekonomi yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 di Kota Ambon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah sebagaimana Tabel III.3.

Tabel III.3. Target Pembangunan Kota Ambon Tahun 2019

No.	Indikator	Nasional	Kota Ambon (RPJMD)
1	Target Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,8	5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5	4,98
3	Inflasi (%)	2,5 – 4,5	4,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	79,80

Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon untuk tahun 2019, direncanakan sebesar 5,5%; tingkat kemiskinan sebesar 4,98%, inflasi sebesar 4,5%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 79,80. Beberapa event penting yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tahun 2019 seperti Pemilihan Umum, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Informasi dan Komunikasi, yang dapat memberikan efek ganda pada roda perekonomian Kota Ambon. Pada sisi lain, Dana Desa dari Pemerintah yang masuk ke rekening desa diharapkan turut membuat dinamika perekonomian Kota Ambon semakin berkembang.

Pada sisi lain, tantangan yang dapat dihadapi selama tahun 2018 dan 2019 sehingga dapat mengganggu roda perekonomian di Kota Ambon adalah cuaca yang ekstrim yang dapat memunculkan resiko bencana alam, seperti kekeringan, rawan air baku, kebakaran hutan, ataupun hujan berkepanjangan, banjir maupun longsor. Hal ini dapat mempengaruhi dapat mengurangi produktivitas kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta roda ekonomi lainnya di Kota Ambon. Kebijakan Pemerintah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ke Daerah bukan bersifat final, tetapi bergantung dengan kondisi keuangan negara, akan turut mempengaruhi penerimaan dan belanja pemerintah daerah Kota Ambon, sekaligus roda perekonomian di daerah, mengingat belanja/ investasi pemerintah merupakan salah satu komponen utama struktur ekonomi Kota Ambon.

Menghadapi tantangan dan prospek perekonomian Kota Ambon Tahun 2018 dan 2019, kemiskinan di Kota Ambon diharapkan tetap diturunkan dan dipertahankan dibawah 5%, mengingat kecenderungan ada penambahan penduduk miskin di Kota Ambon, terutama karena perpindahan penduduk dari luar daerah Kota Ambon, maupun penduduk kota yang rentan miskin akibat inflasi atau keterbatasan pendapatan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan Kota Ambon untuk tahun 2019, khususnya proyeksi keuangan serta arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kota Ambon Tahun 2016, 2017 serta Realisasi Triwulan I Tahun 2018, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel III.4, Tabel III.5, dan III.6.

Tabel II.4. REALISASI DAN PROYEKSI TARGET PENDAPATAN KOTA AMBON

TAHUN 2016 s/d TAHUN 2020							
NO	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	PAGU 2018	REALISASI TAHUN BERJALAN 2018 (TRIWULAN I)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2019	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2020
1	2						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127,227,228,424.30	139,372,008,187.78	143,323,440,498.00	35,241,218,708.69	148,986,886,284.05	154,895,936,204.25
1.1.1	Pajak Daerah	78,545,724,751.36	87,832,224,469.78	83,214,390,976.00	25,218,797,726.92	87,375,110,524.00	91,743,866,050.20
1.1.2	Retribusi Daerah	29,741,850,358.00	31,554,074,927.00	38,559,836,722.00	8,215,110,659.00	39,523,832,640.05	40,511,928,456.05
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,107,621,149.00	-	2,935,000,000.00	-	3,008,375,000.00	3,083,584,375.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan	15,832,032,165.94	19,985,708,791.00	18,614,212,800.00	1,807,310,322.77	19,079,568,120.00	19,556,557,323.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	908,810,346,115.00	851,417,740,634.00	889,674,316,000.00	258,568,874,650.00	889,674,316,000.00	889,674,316,000.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,953,185,040.00	31,652,267,040.00	Rp 33,274,272,000	5,877,078,650.00	33,274,272,000.00	33,274,272,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	686,184,418,000.00	674,130,364,000.00	Rp 674,130,364,000	224,710,112,000.00	674,130,364,000.00	674,130,364,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	191,672,743,075.00	145,635,109,594.00	Rp 182,269,680,000	27,981,684,000.00	182,269,680,000.00	182,269,680,000.00
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64,916,058,400.60	142,370,278,734.62	123,205,418,945.00	6,155,880,400.00	125,669,527,323.00	128,182,917,869.46
1.3.1	Hibah	-	37,913,200,000.00	55,480,000,000.00	-	56,589,600,000.00	57,721,392,000.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	43,256,260,400.60	44,958,071,734.62	36,536,237,945.00	-	37,266,962,703.00	38,012,301,957.06
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21,659,798,000.00	59,499,007,000.00	31,189,181,000.00	6,155,880,400.00	31,812,964,620.00	32,449,223,912.40
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya		-	-			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,100,953,632,939.90	1,133,160,027,556.40	1,156,203,175,443.00	299,965,973,758.69	1,164,330,729,607.05	1,172,753,170,073.71

Sumber: Hasil Analisis BPKAD, 2018

Tabel II.5. REALISASI DAN PROYEKSI TARGET BELANJA KOTA AMBON							
TAHUN 2016 s/d TAHUN 2020							
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	725,895,959,351.25	581,407,850,395.29	606,531,403,949.00	91,644,684,216.00	632,966,354,834.00	660,645,220,877.58
2.1.1	Belanja Pegawai	655,897,542,315.25	520,307,434,024.29	Rp 476,810,760,219	83,917,908,069.00	500,651,298,230.00	525,683,863,141.50
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	Rp -	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	400,000,000.00	412,224,520.00	Rp 487,227,280	-	496,971,825.00	506,911,261.50
2.1.4	Belanja Hibah	26,707,711,700.00	20,403,415,691.00	Rp 16,150,460,750	5,056,569,447.00	16,473,469,965.00	16,802,939,364.30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,000,651,450.00	7,602,100,000.00	Rp 7,000,000,000	1,232,500,000.00	7,140,000,000.00	7,282,800,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	30,332,840,535.00	30,071,634,560.00	Rp 102,582,955,700	406,589,200.00	104,634,614,814.00	106,727,307,110.28
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,557,213,351.00	2,611,041,600.00	Rp 3,500,000,000	1,031,117,500.00	3,570,000,000.00	3,641,400,000.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	725,895,959,351.25	581,407,850,395.29	606,531,403,949.00	91,644,684,216.00	632,966,354,834.00	660,645,220,877.58
2.2	BELANJA LANGSUNG	431,992,785,570.89	499,838,303,380.09	592,671,771,494.00	17,271,652,897.00	610,599,486,942.25	629,189,470,700.40
2.2.1	Belanja Pegawai	22,573,977,950.00	24,137,621,765.00	Rp 14,137,018,100	366,037,550.00	14,419,758,462.00	14,708,153,631.24
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213,896,329,732.44	274,416,455,673.54	Rp 376,058,752,781	13,830,852,852.00	380,579,927,836.62	390,251,526,393.35
2.2.3	Belanja Modal	195,522,477,888.45	201,284,225,941.55	Rp 202,476,000,613	3,074,762,495.00	215,599,800,643.63	224,229,790,675.81
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	431,992,785,570.89	499,838,303,380.09	592,671,771,494.00	17,271,652,897.00	610,599,486,942.25	629,189,470,700.40
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,157,888,744,922.14	1,081,246,153,775.38	1,199,203,175,443.00	108,916,337,113.00	1,243,565,841,776.25	1,289,834,691,577.98

Sumber: Hasil Analisis BPKAD, 2018

Tabel II.6. REALISASI DAN PROYEKSI TARGET PEMBIAYAAN KOTA AMBON							
TAHUN 2016 s/d TAHUN 2020							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94,676,536,437.39	33,677,636,708.89	51,000,000,000.00	-	59,770,254,893.76	61,716,098,737.04
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	94,676,536,437.39	33,677,636,708.89	Rp 51,000,000,000	-	59,770,254,893.76	61,716,098,737.04
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94,676,536,437.39	33,677,636,708.89	51,000,000,000.00	-	59,770,254,893.76	61,716,098,737.04
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,882,703,653.26	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	3,413,034,386.00	8,754,337,824.60	9,129,771,607.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,625,000,000.00	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	257,703,653.26	-	-	3,413,034,386.00	3,754,337,824.60	4,129,771,607.00
	JUMLAH PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	1,882,703,653.26	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	3,413,034,386.00	8,754,337,824.60	9,129,771,607.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	92,793,832,784.13	28,677,636,708.89	43,000,000,000.00	(3,413,034,386.00)	51,015,917,069.16	52,586,327,130.04

Sumber: Hasil Analisis BPKAD, 2018

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan untuk mendukung efektivitas rencana pemerintah daerah, sesuai dengan sumberdaya pendapatan di daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Kota Ambon tahun 2019 (Tabel II.4), direncanakan sebesar Rp.1.164.330.729.608,- atau naik sebesar 0,70% dari APBD Tahun 2018 sebesar Rp.1.156.203.175.443,03,- yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos ini pada proyeksi Tahun 2019 sebesar adalah Rp. 148.986.886.284,88 atau naik sebesar 3,95% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 143.323.440.498,02,- yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pos Pajak Daerah diproyeksikan untuk Tahun 2019 sebesar Rp.87.375.110.524,83 atau naik 5% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.83.214.390.976,03,-

b. Retribusi Daerah

Pos Retribusi Daerah diproyeksikan untuk Tahun 2019 sebesar Rp.39.523.832.640,05 atau naik 2,5% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.38.559.836.722,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pos Pendapatan ini diproyeksikan untuk Tahun 2019 sebesar Rp.3.008.375,00 atau naik 2,5% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.2.935.000.000,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan untuk Tahun 2019 sebesar Rp.19.079.568.120,00 atau naik 2,5% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.18.614.212.800,00,-

2. Dana Perimbangan

Pos ini pada Proyeksi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.889.674.316.000,00 atau sama dengan anggaran Tahun 2018, yang terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sama dengan tahun 2018 sebesar Rp.33.274.272.000,-

b. Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sama dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.674.130.364.000,-

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sama dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.182.269.680.000,-

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos ini pada Proyeksi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.125.669.527.323,90 atau naik sebesar 2% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 123.205.418.945,00 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.56.589.600.000,00 atau naik 2% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.55.480.000.000,00,-.
- b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.37.266.962.703,00 atau naik 2% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.36.536.237.945,00,-.
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.31.812.964.620,00 atau naik 2% dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.31.189.181.000,00,-.

B. Proyeksi Belanja Daerah

Adapun Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun 2019 (Tabel II.5) adalah sebesar Rp.1.243.565.841.776,90 atau naik sebesar 3,7% dari Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.199.203.175.443,00. Pos ini terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 adalah sebesar Rp.632.966.354.834,00 bertambah sebesar Rp. 26.434.950.885,00 atau 4,35% dari Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 yang sebesar Rp.606.531.403.949,10,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.651.298.230,06 atau naik 5% dari Tahun 2018 sebesar Rp.476.810.760.219,00,-.
 - b. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.496.971.825,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.487.227.280,00,-.
 - c. Belanja Hibah
Belanja Hibah diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.16.473.469.965,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.16.150.460.750,00,-.
 - d. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.140.000.000,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.7.000.000.000,00,-.
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.104.634.614.814,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.102.582.955.700,00,-.

- f. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak terduga diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.570.000.000,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.3.500.000.000,00,-.
2. Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 610.599.486.834.942,25 bertambah sebesar Rp. 17.927.715.448,27 atau 3% dari Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 592.671.771.494,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.14.419.758.462,00 atau naik 2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.14.137.018.100,00,-.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.383.579.927.836,62 atau naik 1,2% dari Tahun 2018 sebesar Rp.376.058.752.781,-.
 - c. Belanja Modal
Belanja modal diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.215.599.800.643,63 atau naik 6,5% dari Tahun 2018 sebesar Rp.202.476.000.613,-.

C. Proyeksi Pembiayaan

Dengan memperhatikan proyeksi Anggaran Pendapatan 2019 (Tabel II.6), maka pada sisi penerimaan diperkirakan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.59.770.254.893,76,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.8.754.337.824,60, sehingga jumlah pembiayaan netto adalah Rp.51.015.917.069,16.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Ambon adalah untuk pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, secara efektif, dan efisien.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum Pendapatan Daerah Kota Ambon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan, dan terus mengalami peningkatan, meskipun kemajuan ini belum dapat menunjang kebutuhan belanja daerah secara optimal. Pemerintah Kota Ambon pada hakekatnya telah melakukan berbagai upaya terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan kebutuhan anggaran pada pos pendapatan khususnya dana bantuan namun masih belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah Kota Ambon tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan potensi,

maupun pendekatan kewenangan, baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah.

Untuk terus meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif bersama antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional
5. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penyediaan ruangan pelayanan yang representative, demi kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dalam menciptakan kepuasan pelayanan prima.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mendorong peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Secara bertahap meningkatkan proporsi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Secara bertahap meningkatkan proporsi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Secara bertahap meningkatkan alokasi belanja daerah kepada desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan dengan prioritas menekan angka kemiskinan.
5. Meningkatkan kemampuan dan standar kerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengoptimalkan tata guna dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar.
8. Mengalokasikan kebutuhan belanja rutin secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM dan service mobil).
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah, yang meliputi kegiatan perencanaan koordinasi, konsultasi, pengendalian dan evaluasi.
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan.
 - d. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

C. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan diupayakan agar keuangan daerah tidak mengalami defisit. Hal ini secara normatif dapat direspons melalui kebijakan pembiayaan yang pada dasarnya meliputi transaksi keuangan untuk menutupi deficit.